



**Suara Analisa**

**Dr Zulkarnaen**  
Pengamat Kebijakan Publik Untan

## Demi Kepentingan Publik

**PENGLOLAAN**  
aset atau manajemen aset ini mendapat perhatian kuat dari pemerintah akhir-akhir ini. Kita tahu juga bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu dengan predikat WTP itu, hal yang penting salah satunya mengenai aset yang menjadi salah satu indikator utama. Konteks ini tentunya dituntut juga dalam pengelolaan aset, apa pun itu, harus bertanggungjawab, akuntabilitas dan transparan juga. Karena ini kewajiban sudah jelas, aset yang dilimpahkan pada pemerintah



• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **demi kepentingan**

Kota Pontianak, harus segera dilaksanakan, karena ini menyangkut kekayaan yang dialihkan. Supaya tidak menimbulkan dugaan hal-hal yang boleh menjadi ketidaktransparan.

Prinsipnya harus segera, tapi karena itu sudah diputuskan pemerintah provinsi, tentunya harus patuh atas apa yang menjadi keputusan, untuk diserahkan karena pengelolaannya sekarang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Tera itu sendiri menjadi penting untuk menjawab terkait dengan kepastian timbangan, untuk konsumen dan seterusnya.

Sebenarnya saya pikir pemindahan aset itu tidak ribet, yang utama itu tentu harus ada kepatuhan yang dijalankan. Pengalihan ini kan menyangkut dengan ada beberapa hal yang boleh jadi secara administratif harus diserahkan. Saya pikir tidak merupakan suatu hal yang ribet, yang harus ada terkait dengan katakanlah dimensi politik saya pikir tidak.

Ini betul-betul hal teknis yang harus dijawab secara patuh. Tidak ada ceritanya tidak melaksanakan sesegera mungkin untuk kejelasan pengelolaan itu.

Pemerintah provinsi yang sudah berapa tahun ini WTP seharusnya menjadi contoh yang baik karena sudah WTP, untuk menyelesaikan segala bentuk aset-aset yang dikelolanya itu, termasuk yang akan diserahkan.

Prosedur itu sendiri sudah diatur. Karena itu sudah diatur tahapan-tahapannya, tentu harus segera. Jadi tidak ada yang sulit saya pikir. Untuk itu yang penting kepatuhan, tidak ada yang untung saya pikir jika pemerintah provinsi menahan aset itu, yang utama untuk kepentingan publik. **(rah/lis)**